

ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIMPANGAN PENDIDIKAN

Ni'matuz Sholikhah, Bambang Suratman, Yoyok Soesatyo, & Ady Soejoto

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Surabaya 60231
e-mail: nimatuz_fe@yahoo.com

Abstract: Analysis of Factors Affecting Educational Inequality. This article presents the results of research on educational inequality in the province of East Java. This descriptive correlational study was based on the panel data obtained from the Directorate General of Budget and Fiscal Balance and the Statistics of Indonesia in the period of 2008-2012. The data were analyzed using an application program referred to as Eviews 6, with the Gini index as a measure of the degree of inequality. The analysis reveals the existence of inequality of education in the province of East Java. In addition, there is a relationship between the variables of government expenditure on education, gender gap, and the household expenditure on education and the variable of educational inequality.

Keywords: educational inequality, government expenditure on education, gender gap, education of household expenditure

Abstrak: Analisis Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendidikan. Artikel hasil penelitian ini memaparkan mengenai ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan rancangan deskriptif korelasional berdasarkan data panel periode 2008-2012 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data dianalisis dengan mempergunakan program aplikasi Eviews 6, dengan indeks Gini sebagai ukuran tingkat ketimpangan. Hasil penelitian mengungkap adanya ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terdapat hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga, dengan variabel ketimpangan pendidikan.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, pengeluaran pendidikan rumah tangga

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Pertumbuhan tersebut mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional suatu negara dari waktu ke waktu. Ada tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni (1) akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2011).

Modal manusia (*human capital*) merupakan terminologi yang mengacu kepada pengembangan kapasitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi lainnya untuk meningkatkan

produktivitas. Pengembangan sumberdaya manusia dinilai menjadi penggerak kemajuan ekonomi suatu negara (Arsyad, 2010; Todaro & Smith, 2011). Investasi bidang modal manusia ini analog dengan bentuk investasi konvensional dalam modal fisik. Dengan adanya investasi awal terkait dengan perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan, pada masa mendatang akan dapat diperoleh aliran pendapatan yang lebih tinggi (Tommasi & Ierulli, 1995).

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah pemerataan pendidikan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

RPJMN tersebut menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur (Depdiknas, 2010).

Data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2012 menunjukkan bahwa dari indeks pendidikan dari 38 kota dan kabupaten, Kabupaten Sampang memiliki indeks pendidikan terendah yaitu sebesar 54,47. Indeks pendidikan tertinggi ada di kota Malang, yaitu sebesar 89,33. Terdapat perbedaan antara Kabupaten Sampang dan Kota Malang dilihat dari proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak sekolah hingga tamat perguruan tinggi (BPS, 2012) yang menunjukkan ketimpangan pendidikan di kedua daerah itu.

Perbedaan kualitas sumberdaya manusia atas dasar capaian kelulusan pada jenjang pendidikan untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sampang dan Kota Malang merupakan indikasi adanya ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ketimpangan pendidikan wajib diatasi baik di tingkat daerah maupun pusat sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur dapat ditelaah dari variabel-variabel yang diduga berhubungan dengan ketimpangan. Variabel-variabel tersebut adalah pengeluaran pemerintah atas pendidikan, *gender gap* dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga.

Ketimpangan pendidikan merupakan kondisi ketidakmerataan lulusan pendidikan dari penduduk di suatu daerah. Ukuran ketimpangan pendidikan adalah indeks Gini pendidikan yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk (Thomas dkk., 2000). Indeks Gini Pendidikan memiliki koefisien berkisar antara 0 hingga 1. Semakin rendah indeks koefisien, semakin baik tingkat pemerataan capaian pendidikan, dan semakin tinggi indeks koefisien, menunjukkan terjadinya ketidakmerataan atau ketimpangan pendidikan. Kategori ketimpangan sesuai dengan Indeks Gini Pendidikan (Todaro & Smith, 2011) yaitu (1) indeks 0,71 ke atas adalah wilayah dengan ketimpangan sangat tinggi, (2) indeks 0,5-0,70 adalah wilayah dengan ketimpangan tinggi, (3) indeks 0,36-0,49 adalah wilayah dengan ketimpangan sedang, (4) indeks 0,21-0,35 adalah wilayah dengan ketimpangan rendah, dan (5) indeks 0,20 ke bawah adalah wilayah dengan ketimpangan sangat rendah.

Investasi di bidang sumberdaya manusia dilakukan melalui pengalokasian sejumlah dana untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses kegiatan berlangsung (Atmanti, 2005). Adanya pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dinilai sebagai

sarana investasi pemerintah. Bilamana terjadi ketimpangan pendidikan, maka investasi pemerintah menjadi kunci untuk memerkecil kesenjangan. Hasil penelitian di 38 negara (Liao & Shen, 2011) menunjukkan bahwa terdapat 11,46% dari investasi pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap penurunan derajat ketimpangan pendidikan.

Gender gap menunjukkan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan (Nugroho, 2011). Penelitian di 85 negara penelitian (Thomas dkk., 2000) menunjukkan bahwa *gender gap* berhubungan positif dengan ketimpangan pendidikan yang dicerminkan dengan indeks Gini Pendidikan. Penurunan *gender gap* dalam sektor pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Digdownseiso (2010) dan Bustomi (2012) menyatakan bahwa besarnya perbedaan angka melek huruf di antara gender berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingginya indeks Gini. Semakin lebar kesenjangan *gender* maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendidikan.

Rendahnya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga untuk pembiayaan pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah ketimpangan pendidikan. Penelitian Liao dan Shen (2011) di 38 negara dari 68 negara yang tergabung dalam *Project for International Student Assessment (PISA)* menyebutkan bahwa dari sekian banyak variabel yang memengaruhi ketimpangan pendidikan, 22,44% dipengaruhi oleh variabel perbedaan status ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, temuan penelitian di China (Li & Tsang, 2002) mengungkap bahwa ketimpangan pendidikan terkait dengan gender, dan salah satu penyebabnya adalah pengeluaran belanja pendidikan rumah tangga. Belanja pendidikan rumah tangga menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pengeluaran biaya untuk pendidikan (Todaro & Smith, 2011).

Tujuan kajian ini adalah untuk memaparkan tingkat ketimpangan pendidikan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012, dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap* dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga dengan ketimpangan pendidikan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasional, yang dimaksudkan untuk mengetahui derajat ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Ti-

mur dengan melihat keterkaitan antarvariabel, yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga, dengan ketimpangan pendidikan. Penelitian menggunakan data sekunder berdasarkan dokumen yang tersedia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan variabel penelitian, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengeluaran pemerintah atas pendidikan, yaitu pengeluaran APBD atas fungsi pendidikan di Kota dan Kabupaten. *Kedua*, *gender gap*, yaitu data penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis menurut jenis kelamin di Kota dan Kabupaten. *Ketiga*, pengeluaran pendidikan dari rumah tangga, yaitu data pengeluaran pendidikan perkapita di Kota dan Kabupaten. *Keempat*, ketimpangan pendidikan, yaitu data penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat Perguruan Tinggi menurut Kota dan Kabupaten.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, untuk menjelaskan mengenai ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2008-2012, maka dilakukan pemilahan kluster wilayah penelitian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Kluster Pemilahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

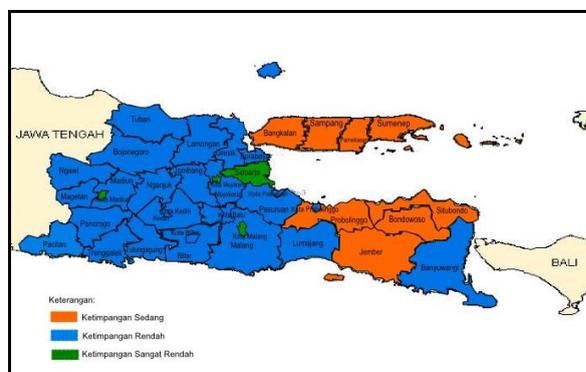
Wilayah	Provinsi Jawa Timur	
	Bagian Timur	Bagian Barat
Kota	Probolinggo, Pasuruan	Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, Madiun, Surabaya, Batu
Kabupaten	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik

Ketimpangan pendidikan didasarkan pada indeks Gini pendidikan yang dilihat dari distribusi capaian sekolah (Thomas dkk., 2000). Sesuai dengan ketersediaan data, terdapat 6 kategori, yaitu tidak pernah bersekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat Perguruan Tinggi. Estimasi model didasarkan pada data panel (*pooled data*) sebagai kombinasi dari data *time series* dan *cross section* (Ajija dkk., 2011). Berdasarkan data panel yang dianalisis dengan menggunakan program aplikasi Eviews 6 melalui uji *likelihood ratio* dan uji Hausman, dengan probabilitas alpha sebesar 0,05 maka pilihan

model *random effect* ditetapkan sebagai landasan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi kluster wilayah penelitian, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 38 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengalami masalah ketimpangan pendidikan. Terdapat sebanyak 8 kabupaten memiliki tingkat ketimpangan pendidikan dalam kategori sedang. Terdapat sebanyak 26 kota dan kabupaten memiliki tingkat ketimpangan pendidikan dalam kategori rendah. Sisanya terdapat 4 kota dan kabupaten memiliki tingkat ketimpangan pendidikan dalam kategori sangat rendah. Ketimpangan pendidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Ketimpangan Pendidikan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Indeks Gini yang diperoleh dari rerata tahun 2008-2012 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendidikan pada 38 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Indeks Gini sesuai dengan kluster wilayah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Gini, Rerata 2008-2012

Wilayah	Bagian Timur	Bagian Barat	Deviasi	Rerata
Kota	0,267	0,218	0,049	0,242
Kabupaten	0,393	0,296	0,097	0,344
Deviasi	0,126	0,078	---	0,102
Rerata	0,330	0,257	0,073	0,293

Berdasarkan indeks Gini sebagaimana Tabel 2, dapat diungkap bahwa ketimpangan pendidikan tertinggi berada di wilayah kabupaten pada bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan indeks sebesar 0,393. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup lebar pada penduduk usia di atas 15 tahun antara yang tidak menyelesaikan dan

yang menyelesaikan jenjang pendidikannya. Selanjutnya, ketimpangan pendidikan terendah berada di wilayah kota di bagian barat Provinsi Jawa Timur dengan indeks sebesar 0,218. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara relatif tingkat kesenjangan pendidikan pada penduduk usia di atas 15 tahun lebih sempit, atau dengan kata lain terdapat lebih banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikannya. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa simpangan tertinggi mengenai ketimpangan pendidikan berada di wilayah kota dan kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Hal demikian menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan terdapat lebih banyak penduduk usia di atas 15 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikannya di banding wilayah kabupaten. Dengan kata lain, di wilayah kabupaten terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikannya di banding wilayah kota.

Hasil analisis mengenai hubungan antara ketiga variabel, yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga, dengan variabel ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 3. Variabel-variabel tersebut berkontribusi sebesar 96,34% terhadap terjadinya ketimpangan pendidikan.

Tabel 3. Variabel-Variabel yang Berhubungan dengan Ketimpangan Pendidikan

Variabel	Koefisien	Prob.	Hubungan
Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan	8,256	0,0010	Positif, signifikan
<i>Gender Gap</i>	0,504	0,0332	Positif, signifikan
Pengeluaran Pendidikan dari Rumah Tangga	-10,533	0,0002	Negatif, signifikan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan ketimpangan pendidikan di kota dan kabupaten Provinsi Jawa Timur. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa variabel investasi pemerintah dalam pendidikan mempunyai andil dalam mempengaruhi ketimpangan pendidikan disuatu daerah (Liao & Shen, 2011). Kondisi tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2012).

Hasil penelitian Bustomi (2012) di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2007-2010 memperoleh temuan bahwa terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendidikan. Peningkatan pengeluaran tersebut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan, memberikan

kemudahan penduduk untuk mengakses pendidikan, sehingga terdapat pemerataan lulusan pendidikan pada penduduk di atas usia 15 tahun, yang tercermin dari penurunan indeks gini pendidikan.

Terdapatnya hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan ketimpangan pendidikan di Jawa Timur sesungguhnya bertentangan dengan kaidah yang seharusnya. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan teori pengembalian manfaat dan biaya sosial pendidikan (Todaro & Smith, 2011).

Terdapat dua sudut pandang mengenai investasi sosial dalam pendidikan. *Pertama*, jika investasi dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa biaya sosial terbayar dengan manfaat sosial, maka berarti manfaat sosial lebih besar dari biaya sosial. Hal ini berdampak pada hasil investasi yang positif, yaitu diperolehnya peningkatan sumberdaya manusia. Akibatnya akan menyebabkan menurunnya derajat ketimpangan pendidikan. *Kedua*, jika investasi dalam bidang pendidikan memberikan manfaat sosial lebih rendah dari biaya sosial yang dikeluarkan, maka akan berdampak negatif. Hal demikian dapat terjadi jika investasi dalam pendidikan tidak memerhatikan jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi di Provinsi Jawa Timur memberi gambaran bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan ternyata turut membesar ketimpangan pendidikan.

Adanya hubungan positif variabel pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dengan ketimpangan pendidikan adalah sebagai akibat dari alokasi investasi yang tidak tepat sasaran. Hal ini didukung data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bahwa alokasi anggaran APBD kota dan kabupaten untuk fungsi pendidikan yakni hanya kurang dari 30% dari keseluruhan anggaran pendidikan. Kurang dari 30% dari APBD untuk fungsi pendidikan dialokasikan untuk program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Sisa anggaran dipergunakan untuk program-program pendidikan lainnya yang kurang tepat sasaran terkait dengan kemudahan penduduk untuk mengakses pendidikan gratis di tingkat SD, SLTP, SLTA, bahkan PT. Beberapa program lainnya di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan dan jembatan.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 4, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan

pendidikan lintas daerah kota dan kabupaten untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas, 2003). Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program yang digiatkan oleh pemerintah, begitupun di Provinsi Jawa Timur. Program ini diharapkan mampu mengantarkan penduduk Provinsi Jawa Timur pada tingkat pendidikan dasar SLTP. Namun demikian, pada tataran implementasi di lapangan, program ini belum mampu membiayai secara keseluruhan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar baik SD maupun SLTP. Hal ini dibuktikan masih adanya pungutan seragam sekolah, pungutan uang buku dan LKS, serta pungutan lainnya dari sekolah untuk peserta didik baik di sekolah negeri maupun swasta (Publiknasion.com, 2011).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk pembiayaan tingkatan pendidikan atas (SLTA), anggaran yang dikucurkan pemerintah di beberapa daerah sampel hanya sebatas kurang dari 10% dari anggaran pendidikan secara keseluruhan. Hal inilah yang kurang mendukung penduduk usia sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan di tingkatan yang lebih tinggi (SLTA).

Untuk jenjang perguruan tinggi, tidak terdapat alokasi anggaran dari APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Kemendiknas, 2013). Sehingga perguruan tinggi mendapatkan tunjangan bantuan pendidikan seperti halnya program bidik misi untuk siswa miskin dan beasiswa-beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendidikan APBN. Akibatnya, penduduk di lingkup daerah secara otonomi tidak mendapatkan dukungan dalam mendapatkan akses pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Sebagai konsekuensi dari alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk bidang pendidikan tidak tepat sasaran, menyebabkan semakin besarnya jurang ketimpangan pendidikan di kota dan kabupaten Provinsi Jawa Timur. Untuk itu diperlukan pembenahan kebijakan dengan alokasi pengeluaran yang lebih tepat sasaran untuk menurunkan indeks Gini pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, penelitian juga mengungkap bahwa variabel *gender gap* yang dilihat dari ketidaksetaraan melek huruf antara laki-laki dan perempuan memiliki kaitan dengan ketimpangan pendidikan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Thomas dkk. (2000), Digidowiseiso (2010), dan Bustomi (2012). Berdasarkan penelitian di 85 negara dalam rentang

waktu antara 1960 hingga 1990 terungkap bahwa terdapat pengaruh dari *gender gap* yang diukur dari ketidaksetaraan buta huruf antar gender terhadap ketimpangan pendidikan (Thomas dkk., 2000). Hal demikian berarti bahwa ketidakadilan pada gender untuk mengakses pendidikan menyumbang terjadinya masalah ketimpangan pendidikan.

Semakin tinggi ketidaksetaraan gender dalam memperoleh pendidikan yang dicerminkan dari tingkat melek huruf, akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat ketimpangan pendidikan. Adanya ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur membuka wacana bahwa terdapat fenomena ketidaksetaraan gender untuk mengakses pendidikan. Masalah ketidaksetaraan gender dalam mengenyam pendidikan dapat dikarenakan adanya marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe.

Marginalisasi pada gender yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan dapat bersumber pada kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Nugroho, 2011). Bentuk *marginalisasi* kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan di Provinsi Jawa Timur cenderung sebagai bentuk keyakinan masyarakat dan tradisi daerah. *Subordinasi* adalah pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, yaitu memprioritaskan pendidikan bagi kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya nanti akan menjadi ibu rumah tangga. *Stereotipe* merupakan bentuk pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu dan berakibat pada perlakuan diskriminatif. *Stereotipe* tersebut berdampak pada penomorduuan pendidikan bagi kaum perempuan.

Dari ketiga bentuk ketidaksetaraan gender tersebut jika dilihat dari kondisi budaya di Provinsi Jawa Timur, terjadinya *gender gap* dalam pendidikan berasal dari keyakinan tradisi masyarakat setempat. Kuatnya tradisi masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya mempunyai peran di rumah tangga daripada bekerja yang memersyaratkan perolehan pendidikan pada jenjang lebih tinggi. Anggapan tersebut menempatkan kaum perempuan pada posisi kedua dalam menempuh pendidikan dibanding dengan kaum laki-laki. Ditambah lagi dengan tradisi pernikahan terlalu dini di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur menyebabkan rendahnya kesempatan bagi kaum wanita untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Semakin melekat keyakinan tersebut, maka semakin sulit pula mengatasi ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah pada masing-masing daerah untuk mengubah pandangan keyakinan masyarakat tentang

pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pendidikan bagi kaum perempuan dinilai mampu mengubah kualitas sumberdaya manusia suatu negara. Adanya kesempatan mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan akan menempatkan mereka pada status profesional yang setara dengan kaum laki-laki. Meskipun perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga, pentingnya pendidikan adalah akan mampu mengubah kualitas hidup generasi berikutnya (anak-anaknya) kelak.

Gender gap menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Diperlukan langkah untuk menurunkan *gender gap* dengan mewujudkan kesetaraan akses pendidikan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antargender untuk memiliki akses, kesempatan partisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memperoleh manfaat setara dan adil dari pembangunan (Nugroho, 2011). Penurunan *gender gap* merupakan langkah yang berimbas pada menurunnya ketimpangan pendidikan.

Terakhir, hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel pengeluaran pendidikan dari rumah tangga dengan ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Hal demikian berarti bahwa rendahnya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga memiliki konsekuensi tingginya ketimpangan pendidikan, atau sebaliknya. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Liao dan Shen (2011), serta Li dan Tsang (2002). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan oleh rumah tangga berkontribusi terhadap ketimpangan pendidikan.

Teori manfaat dan biaya (Todaro & Smith, 2011) menjelaskan bahwa pengembalian yang diharapkan oleh individu dan biaya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga searah dengan lamanya jenjang pendidikan yang diselesaikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengeluaran biaya untuk pendidikan dari rumah tangga juga semakin besar. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran biaya pendidikan, maka harapan pengembalian atas pendidikan akan semakin meningkat. Rumah tangga yang menginginkan manfaat dari tingginya pendidikan yang akan ditempuh, memilih untuk berinvestasi pada *human capital* melalui pengeluaran pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga bersedia mengeluarkan berinvestasi dalam bidang pendidikan. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan, akan semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat dicapai.

Akses untuk memperoleh pendidikan di Provinsi Jawa Timur didukung dengan pembiayaan dari pemerintah dan pengeluaran rumah tangga. Pemerintah

menyediakan akses di semua jenjang pendidikan bagi penduduk dengan proporsi berbeda. Program pendidikan wajib belajar 9 tahun adalah salah satu program yang dimaksudkan untuk pemeratakan pendidikan penduduk hingga jenjang SLTP. Program wajib belajar 9 tahun tidak sepenuhnya membebaskan siswa dari sumbangan biaya pendidikan. Biaya yang tidak didanai oleh pemerintah menjadi tanggungan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran biaya pendidikan oleh rumah tangga setiap bulan di antaranya adalah sumbangan pembangunan sekolah, uang sekolah atau iuran BP3, biaya untuk pengembangan keterampilan, bimbingan belajar, ujian, buku pelajaran, fotokopi bahan ajar, alat tulis, dan berbagai kursus untuk kepentingan investasi *human capital*. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dapat ditempuh oleh penduduk, dan akibatnya akan memerkecil ketimpangan pendidikan di wilayah tersebut. Tinggi rendahnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di suatu wilayah menunjukkan besar kecilnya investasi *human capital* di masyarakat.

SIMPULAN

Terdapat masalah ketimpangan pendidikan di 38 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendidikan tertinggi berada di wilayah kabupaten pada bagian timur dan ketimpangan pendidikan terendah berada di wilayah kota di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Di wilayah perkotaan terdapat lebih banyak penduduk usia di atas 15 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikannya di banding wilayah kabupaten. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat keterkaitan antara variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga, dengan ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

Untuk menurunkan ketimpangan pendidikan, direkomendasikan bahwa perlu pembenahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menempatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan yang lebih tepat sasaran. Juga diperlukan kebijakan pembangunan untuk mengubah persepsi masyarakat terkait gender yaitu *marginalisasi*, *subordinasi*, dan *stereotype* sehingga mampu menurunkan *gender gap* sebagai upaya penurunan tingkat ketimpangan pendidikan. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu membangun kesadaran masyarakat terutama di arahkan kepada wilayah dengan kesenjangan pendidikan yang besar mengenai pentingnya investasi di bidang *human capital*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajija, S.R., Sari, D.W., Setianto, R.H., & Primanti, M.R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan* (Edisi ke-5). Yogyakarta: Unit Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Atmanti, H.D. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2 (1): 30-39.
- BPS. 2012. *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Bustomi, M.J. 2012. Ketimpangan Pendidikan antar Kabupaten/Kota dan Implikasinya di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, (Online), (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>), diakses 6 Desember 2013.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2010. *Peraturan Menteri pendidikan nasional Republik indonesia Nomor 2 tahun 2010 Tentang Rencana strategis kementerian pendidikan nasional tahun 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas.
- Digdownseiso, K. 2010. *Measuring Gini Coefficient of Education: The Indonesian Case. Munich Personal RePEc Archive Paper, No. 19865*, (Online), (<http://mpra.ub.uni-muenchen.de>), diakses 10 Desember 2013.
- Kemenkumham. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham.
- Li, D. & Tsang, M.C. 2002. *Household Education Decisions and Implications for Gender Inequality in Education in Rural China*. Paper was presented at the annual national conference of the Association for Asian Studies, Washington, DC, April 4-7, 2002, (Online), (<http://www.tc.columbia.edu>), diakses 21 April 2014.
- Liao, M. & Shen, H. 2011. Educational Inequality Analysis: International Comparison. *International Journal of Business and Social Science*, 2 (16): 88-93.
- Nugroho, R. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Publiknasional.com. 03 Agustus, 2011. *Pungli Terbanyak di Jatim dan Jogjakarta*, (Online), (<http://www.publiknasional.com>), diakses 09 Agustus 2014.
- Thomas, V., Yan, W., & Xibo, F. 2000. *Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education. Policy Research Working Paper, World Bank Institute*, (Online), (<https://openknowledge.worldbank.org>), diakses 10 Desember 2013.
- Todaro, M. & Smith, S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi: Edisi kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tommasi, M. & Ierulli, K. 1995. *The New Economics of Behavior*. Australia: The University of Cambridge.